

## **Jalan Ditutup, Suara Dibuka: Boikot Jalan sebagai Ekspresi Ketidakadilan Sosial di Bima**

**Wahyudi,<sup>1</sup> Herman<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Doktor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: wahyudiwinarjo64@gmail.com, sancakanaru10@gmail.com

\*Korespondensi

**Article History:** Received: 26-01-2026, Revised: 06-03-2026, Accepted: 07-03-2026, Published: 31-03-2026

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik boikot jalan di Kabupaten Bima sebagai manifestasi gerakan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan, lemahnya perlindungan keamanan, serta terbatasnya mekanisme partisipasi formal. Boikot jalan tidak diposisikan semata-mata sebagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, melainkan dipahami sebagai taktik politik kolektif warga untuk mendorong negara agar menanggapi tuntutan mereka. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan warga dan aktor yang terlibat, observasi langsung di lokasi aksi boikot jalan, serta telaah dokumen berupa pemberitaan media dan laporan resmi pemerintah. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan mengacu pada perspektif sosiologi politik dan teori gerakan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa boikot jalan di Bima merupakan hasil akumulasi ketidakpuasan struktural masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak dalam jangka panjang, meningkatnya tingkat kriminalitas, serta lambannya respons pemerintah daerah. Infrastruktur jalan sebagai ruang publik mengalami proses politisasi dan berubah fungsinya menjadi arena ekspresi kolektif dalam memperjuangkan keadilan sosial. Bagi warga, boikot jalan dimaknai sebagai sarana untuk merebut kembali posisi tawar dalam relasi kekuasaan yang timpang dengan negara. Sementara itu, respons pemerintah terhadap aksi tersebut bersifat ambivalen, bergerak antara pendekatan represif ringan dan dialogis, dengan implementasi kebijakan yang cenderung tidak menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa boikot jalan merupakan bagian dari repertoar aksi kolektif lokal yang bersifat rasional dan kontekstual, sekaligus mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di wilayah terpinggirkan seperti Bima.

### **Kata Kunci:**

boikot jalan; gerakan sosial; ketidakadilan sosial

### **Abstract**

This study aims to examine the practice of road blockades in Bima Regency as a manifestation of grassroots social movements responding to social injustice, particularly those related to deteriorating road infrastructure, weak security protection, and limited formal mechanisms of participation. Road blockades are not viewed merely as disruptions to public order; rather, they are understood as collective political tactics employed by citizens to pressure the state into addressing their demands. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with community members and relevant actors, direct field observations at road blockade sites, and document analysis of media reports and official government records. The data were analyzed thematically, drawing on perspectives from political sociology and social movement theory. The findings indicate that road blockades in Bima represent an accumulation of structural

grievances stemming from prolonged road deterioration, rising levels of criminal activity, and the slow response of local government authorities. Road infrastructure, as a form of public space, has undergone a process of politicization and has been transformed into an arena for collective expression in the pursuit of social justice. For local residents, road blockades are perceived as a means of reclaiming bargaining power within an unequal relationship of power vis-à-vis the state. Meanwhile, governmental responses to these actions are ambivalent, oscillating between mild repressive measures and dialogical approaches, with policy implementation remaining partial and inconsistent. These findings underscore that road blockades constitute a rational and context-specific repertoire of local collective action, while simultaneously reflecting weaknesses in public service governance in marginalized regions such as Bima.

**Keywords:**

oad blockades; social injustice; social movements



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Gerakan sosial yang sedang terjadi di berbagai tempat di dunia menunjukkan bahwa semakin banyak orang berkumpul untuk melawan ketidakadilan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan akses ke layanan yang penting. Jalan, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sering menjadi tempat gangguan antara masyarakat dan pemerintah saat pengelolaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Dalam situasi ini, boikot jalan, yang bisa berarti menutup, menguasai, atau menghentikan akses ke jalan oleh warga, muncul sebagai cara bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan untuk menyuarakan pendapat mereka. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di berbagai daerah di seluruh dunia sebagai reaksi terhadap ketidakadilan pembangunan, pengucilan politik, dan lemahnya tanggapan pemerintah terhadap harapan Masyarakat (Tarrow, 2021). Di Indonesia, misalnya, jalan boikot semakin sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini penting karena boikot jalan di Bima bukan hanya protes yang muncul tiba-tiba, melainkan juga menggambarkan ketimpangan dalam kekuasaan, kegagalan dalam mewakili kepentingan politik, serta upaya warga untuk "didengarkan" melalui pengendalian atas ruang publik yang penting.

Kajian akademis tentang gerakan sosial telah berkembang sangat cepat, terutama melalui cara yang berhubungan dengan politik yang kontroversial, pemobilan sumber daya, dan akses terhadap peluang politik. Literatur mulai berubah dengan penekanan bahwa tindakan kolektif tidak lagi hanya terbatas pada cara-cara biasa, tetapi juga mencakup berbagai cara yang lebih terikat pada konteks lokal, seperti penguasaan wilayah dan sarana (Tilly & Wood, 2020). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa konflik mengenai infrastruktur sering kali menjadi cara untuk mengungkap ketidakadilan sosial, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal dalam pembangunan (Harvey & Knox, 2022). Namun, ada yang memuat dalam literatur mengenai apakah aksi seperti boikot jalan harus dilihat sebagai cara yang rasional untuk melawan politik atau sebagai tindakan yang mengganggu yang berpengaruh pada legitimasi gerakan sosial itu sendiri. Beberapa peneliti menganggap aksi ini

sebagai “politik jalanan” yang bisa memaksa pemerintah untuk mendengarkan permintaan masyarakat, sementara yang lain berpendapat bahwa strategi ini bisa memicu tindakan kriminalisasi dan mengurangi ruang demokrasi (della Porta, 2015; Michael Noonan, 2016). Di Indonesia, penelitian ilmiah tentang boikot jalan masih terbatas dan sering kali dianggap sebagai gangguan yang biasa, bukan sebagai tindakan politik masyarakat yang memiliki makna sosial dan struktural yang dalam (Wardana, 2022). Kesejangan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih dalam dan sesuai dengan konteks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji boikot jalan di Bima sebagai suatu gerakan sosial yang menggambarkan ketidakadilan sosial dan kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar warganya. Dengan menggunakan sudut pandang sosiologi politik serta teori gerakan sosial, penelitian ini menjelaskan cara orang-orang lokal memproduksi, memahami, dan bernegosiasi mengenai aksi boikot jalan dalam interaksi mereka dengan pemerintah. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa boikot jalan di Bima bukan hanya sekadar protes yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan strategi bersama yang muncul dari rasa kecewa yang mendalam, tidak mengizinkan saluran partisipasi yang resmi, serta ketidakadilan dalam pembagian infrastruktur. Melalui aksi ini, masyarakat berusaha mengubah peran mereka dari hanya sebagai objek kebijakan menjadi subjek politik yang memiliki kekuatan untuk memberi pengaruh (Subaril & Anwar, 2022).

Untuk mencegah kebingungan dalam konteks, beberapa istilah teknis harus dijelaskan dari awal. Gerakan sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan bersama yang diselenggarakan baik secara resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menantang, bernegosiasi, atau mengubah hubungan kekuasaan yang dianggap tidak adil. Boikot jalan dijelaskan sebagai bentuk aksi bersama di mana warga menutup atau menghalangi jalan umum sebagai cara untuk memberi tekanan politik kepada pemerintah atau otoritas lokal. Ketidakadilan sosial dipahami sebagai keadaan di mana pembagian sumber daya, layanan publik, dan kesempatan hidup berlangsung dengan tidak adil dan sistematis, sehingga merugikan kelompok tertentu. Istilah negara dalam penelitian ini mengacu pada lembaga pemerintahan di tingkat lokal dan daerah yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyediakan infrastruktur publik. Semua singkatan dan istilah teknis lainnya akan dijelaskan saat pertama kali digunakan. Penelitian ini tidak menyertakan tabel atau gambar di bagian pendahuluan; jika digunakan di bagian berikutnya, tabel dan gambar akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan standar publikasi ilmiah internasional (Massauna et al., 2025).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena boikot jalan sebagai bentuk gerakan sosial di Bima. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, motivasi, dan proses sosial yang melatarbelakangi tindakan kolektif warga, yang tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif semata. Studi kasus digunakan karena boikot jalan di Bima merupakan fenomena kontekstual yang terikat oleh ruang, waktu, dan hubungan sosial tertentu, sehingga memerlukan analisis holistik dan mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian gerakan sosial yang menekankan pemahaman atas pengalaman subjektif aktor,

dinamika konflik, serta hubungan kekuasaan antara warga dan negara (Rahmatullah et al., 2023).

Penelitian dilakukan dengan beberapa langkah yang teratur. Langkah pertama adalah penelitian awal, yang meliputi pencarian dokumen, berita di media, dan laporan dari organisasi masyarakat untuk memahami konteks sosial dan sejarah tindakan boikot jalan di Bima. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen pendukung. Langkah ketiga adalah analisis data yang dilakukan secara bersamaan dan bertahap, di mana pengumpulan dan analisis data dilakukan pada waktu yang sama untuk memperdalam dan menjelaskan temuan. Langkah terakhir adalah menyusun dan menarik kesimpulan, dengan kesimpulan yang dikumpulkan berdasarkan teori gerakan sosial dan sosiologi politik (Fahmi & Herman, 2021). Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian kualitatif. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta persetujuan secara sadar (*informed consent*). Identitas informan disamarkan untuk melindungi keamanan dan privasi mereka, mengingat sensitivitas isu dan potensi risiko sosial-politik yang melekat pada aksi boikot jalan.

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang Struktural Boikot Jalan di Bima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bima tercatat ada 61 kali peristiwa pemblokiran jalan dalam empat tahun terakhir. Rinciannya, pada 2021 ada 15 kali pemblokiran jalan, 2022 ada 18 kali, 2023 ada 20 kali, dan pada 2024 hingga April ada delapan kali. Bahwa boikot jalan di Bima tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari ketidakpuasan struktural warga terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki (Rafiin, 2024). Seluruh informan warga menyatakan bahwa kerusakan jalan telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta mobilitas sosial sehari-hari (Setiawan & Rudiarto, 2016).



**Gambar 1.** Salah Satu Aksi Blokade Jalan di Bima  
Sumber: [Republika.co.id](https://republika.co.id)

Kondisi jalan di Kabupaten Bima semakin buruk. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima melaporkan bahwa 52 persen jalan di daerah ini

rusak. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bima, Warid Wajdi, mengatakan bahwa kerusakan jalan biasanya terjadi karena banjir yang sering terjadi di beberapa tempat. Masalah ini semakin buruk karena penanganannya lambat akibat kekurangan dana untuk jalan merawat. Saat ini, dana untuk pemeliharaan jalan di Kabupaten Bima hanya Rp 150 juta setiap tahun, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya, yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar setiap tahun.

Selain ada batasan anggaran dari daerah, uang yang diberikan oleh pemerintah pusat juga berkurang. Tahun ini, Kabupaten Bima hanya mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 24,6 miliar, turun dari tahun lalu yang mencapai Rp 32 miliar. Uang itu hanya bisa digunakan untuk memperbaiki empat jalan yang rusak, dengan kerusakan yang bervariasi dari berat sampai ringan. Salah satu jalan yang rusaknya parah ada di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, yang menghubungkan Kecamatan Donggo dengan Bolo.

Warga di sekitar merasa sangat kesal dengan jalan yang sudah hancur selama bertahun-tahun dan sering menyebabkan kecelakaan. Alfian, seorang penduduk Desa Mpili, menjelaskan bahwa sistem saluran air yang buruk membuat air hujan menggenangi jalan, sehingga aspalnya cepat rusak. Ia juga menekankan bahwa pengaspalan jalan terlihat tipis dan tidak awet. Walaupun ada kabar bahwa jalan ini akan diperbaiki pada tahun 2024, sampai saat ini belum ada kepastian kapan perbaikannya akan dimulai.

Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa protes boikot jalan di Bima tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi jalan yang sudah lama rusak dan belum diperbaiki. Semua orang yang diwawancarai dalam penelitian itu mengatakan bahwa kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama dan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pergerakan sosial sehari-hari. Jadi, kerusakan infrastruktur jalan di Bima bukan hanya masalah teknis, tapi sudah menjadi isu sosial dan politik yang menunjukkan kesinambungan antara apa yang dibutuhkan warga dan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dasar (Rafiin, 2024).

**Tabel 1.** Dampak Kerusakan Jalan terhadap Kehidupan Warga

<b>Bidang Kehidupan</b>	<b>Dampak yang Dirasakan</b>
Ekonomi	Biaya transportasi meningkat, hasil pertanian sulit dipasarkan
Pendidikan	Akses siswa ke sekolah terhambat
Kesehatan	Kesulitan mencapai fasilitas Kesehatan
Sosial	Isolasi wilayah dan menurunnya interaksi antarwilayah

Sumber: Data Penelitian, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa kerusakan jalan dipersepsikan warga sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang bersifat multidimensi, bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Selain latar belakang boikot jalan karena kerusakan jalan, masih banyak hal yang menyebabkan boikot jalan yang dilakukan masyarakat Bima. Yang paling disorot adalah masalah pembacokan antarwarga, perampokan motor, atau bahkan pembunuhan yang dilakukan antarwarga dan antardesa. Contoh untuk beberapa studi kasus telah disebutkan di atas.

### **Boikot Jalan karena Pembunuhan**

Memperlihatkan aksi blokade jalan yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat seorang pria yang tewas di sebuah rumah kos di Kabupaten Bima. Puluhan warga, termasuk perempuan dan anak-anak, tampak berdiri dan duduk di badan jalan sambil menyaksikan batang-batang kayu dan ranting pohon yang melintang, menutup akses jalan utama. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas terhenti total sebagai bentuk boikot jalan dan protes terbuka terhadap aparat penegak hukum.



**Gambar 2.** Keluarga Pria Tewas di Kos Bima Blokade Jalan, Tuntut Polisi Tangkap Pelaku Lain  
Sumber: Detik.com

Ekspresi orang-orang menunjukkan bahwa mereka merasa cemas dan terasing, mencerminkan rasa sedih dan marah atas kematian korban yang dianggap belum sepenuhnya terselesaikan. Kehadiran petugas keamanan terlihat di sekitar tempat kejadian, namun masyarakat tetap berdiri di jalan sebagai tanda menuntut keadilan. Dengan aksi blokade ini, keluarga korban meminta polisi untuk segera menangkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Peristiwa ini menggambarkan dinamika konflik antara masyarakat dan aparat di Bima, di mana jalan raya tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga menjadi arena ekspresi politik dan sosial dalam menuntut keadilan (Syafuruddin & Wadi, 2023; Mitchell, 1996; Crawford, 1995).

### **Boikot Jalan Karena Perampokan**

Memperlihatkan tindakan boikot jalan yang dilakukan oleh masyarakat Belo Selatan di daerah Bima sebagai ungkapan protes terhadap banyaknya pencurian yang dianggap membuat khawatir dan kurang mendapat perhatian serius. Beberapa warga terlihat menghalangi jalan dengan balok kayu, batu, dan bahan-bahan yang ada, sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Tindakan ini dilakukan di area organisasi, menunjukkan bahwa rasa tidak aman sudah memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung.



**Gambar 3.** Jalan Lintas Tente Karumbu Diblokir Warga Desa karena kasus Perampokan  
Sumber: Data Penelitian, 2026

Di sekitar tempat itu, orang-orang dari berbagai umur berkumpul untuk berempati terhadap keadaan. Seorang wanita terlihat berdiri di tengah-tengah tiang kayu, sebagai simbol partisipasi aktif warga, termasuk wanita, dalam aksi bersama untuk meminta jaminan keamanan. Wajah-wajah orang menunjukkan bahwa mereka hati-hati, tapi juga merasa kecewa terhadap pihak keamanan yang dianggap lamban dalam menangani kasus-kasus peminjaman yang sering terjadi.

Boikot jalan ini menjadi tanda perlawanan masyarakat Bima terhadap meningkatnya angka kejahatan. Jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat lewat, tetapi juga bertransformasi menjadi tempat untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, terutama tuntutan agar pihak yang berwenang segera menangkap pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindakan ini menunjukkan bahwa ketika cara-cara resmi dianggap tidak berhasil, warga memilih untuk bersatu menekan sebagai strategi dalam mencari keadilan dan perlindungan. Sebenarnya masih banyak kasus boikot jalan yang dilakukan oleh masyarakat Bima. Peneliti hanya memberikan sebagian contoh atau kondisi boikot jalan di Bima.

### **Makna Boikot Jalan bagi Warga**

Respons pemerintah terhadap boikot jalan di Bima dapat digambarkan sebagai ambivalen, menunjukkan sikap yang berada di antara dua posisi yang berlawanan. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kelancaran aktivitas publik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan dari masyarakat yang menggunakan boikot jalan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan protes terhadap kebijakan atau isu yang belum terselesaikan dengan memadai. Dari perspektif pejabat pemerintah dan pasukan keamanan, boikot atau penutupan jalan sering dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Jalan merupakan infrastruktur publik vital yang mendukung mobilitas publik, distribusi barang, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika jalan ditutup, dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh warga yang tidak terlibat langsung dalam konflik atau protes. Kemacetan, keterlambatan distribusi logistik, gangguan layanan darurat, dan

potensi kerugian ekonomi adalah semua faktor yang harus dipertimbangkan (Fauziah, 2025).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa pada tahap awal protes, pihak berwenang sering hadir di lokasi untuk memantau situasi yang berkembang. Kehadiran ini umumnya disertai dengan peringatan, imbauan keamanan, dan tekanan kepada warga untuk segera membuka kembali jalan yang diblokir. Pasukan keamanan, termasuk polisi dan pejabat pemerintah daerah, dipandang oleh warga bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai perwakilan kekuasaan negara, yang menandakan bahwa protes tersebut berada dalam batas kendali dan pengawasan negara. Meskipun intervensi ini jarang terwujud dalam kekerasan fisik secara terang-terangan, warga merasakan tekanan psikologis yang berasal dari peringatan berulang, komunikasi satu arah, dan proses negosiasi yang tidak setara. Situasi ini secara bertahap melemahkan daya tawar dan tekad warga yang terlibat dalam boikot, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan represi di masa depan (Suci et al., 2025).

Aksi boikot jalan di Bima telah terbukti menjadi alat strategis untuk memicu dialog terbuka antara warga dan pemerintah. Mengingat terbatasnya akses warga terhadap saluran partisipasi politik formal, blokade jalan telah menjadi mekanisme tekanan yang efektif untuk menarik perhatian otoritas publik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika boikot berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan, mengganggu mobilitas, dan menarik perhatian media dan publik secara luas, pemerintah daerah cenderung merespons dengan mengirimkan perwakilan resmi untuk bertemu dengan warga. Pertemuan-pertemuan ini umumnya diadakan di lokasi boikot sebagai respons langsung terhadap situasi di lapangan, atau difasilitasi melalui forum audiensi di kantor desa atau kecamatan. Forum dialog ini sangat penting karena membuka kembali saluran komunikasi yang sebelumnya ditutup atau diabaikan oleh pemerintah. Melalui dialog-dialog ini, warga memiliki kesempatan untuk secara langsung menyampaikan keluhan, tuntutan, dan pengalaman mereka mengenai berbagai bentuk ketidakadilan struktural, baik yang berkaitan dengan layanan publik, kebijakan pembangunan, atau hubungan kekuasaan yang tidak setara antara masyarakat setempat dan negara. Lebih lanjut, dialog yang dipicu oleh boikot jalan ini menunjukkan bahwa aksi kolektif warga memiliki kekuatan tawar-menawar politik yang signifikan. Boikot tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang mengganggu, tetapi juga sebagai strategi negosiasi oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menuntut pengakuan, kehadiran, dan akuntabilitas dari negara. Dengan demikian, boikot jalanan di Bima dapat dipahami sebagai praktik politik warga yang pragmatis, di mana tekanan di ruang publik digunakan untuk membuka kemungkinan dialog dan negosiasi ulang hubungan antara warga dan pemerintah (Firdaus, 2022).

Aksi boikot jalan berfungsi sebagai mekanisme tekanan sosial yang efektif untuk memaksa intervensi negara dan menciptakan ruang untuk mengatasi tuntutan warga. Dengan mengganggu mobilitas dan kepentingan publik yang lebih luas, tindakan ini meningkatkan urgensi bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah menanggapi tekanan ini dengan mengirimkan perwakilan resmi ke lokasi protes atau mengundang perwakilan warga ke pertemuan publik. Melalui pertemuan-pertemuan ini, pejabat pemerintah sering kali membuat berbagai janji perbaikan, baik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penguatan keamanan regional, atau percepatan

penanganan kasus kriminal yang menjadi pemicu utama protes. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa realisasi janji-janji ini sering kali parsial, tidak lengkap, dan bertahap. Beberapa ruas jalan memang diperbaiki sebagai respons awal, tetapi kualitas dan cakupannya sering kali tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan warga. Dalam beberapa kasus, proses perbaikan berjalan lambat, tertunda karena alasan administratif, kendala anggaran, atau perubahan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Akibatnya, perbaikan yang dijanjikan tidak selalu menghasilkan perubahan substantif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini mencerminkan respons negara yang cenderung minimalis dan pragmatis, di mana pemenuhan tuntutan warga lebih berfokus pada meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas sosial daripada mengatasi akar permasalahan secara komprehensif. Janji-janji perbaikan berfungsi sebagai alat negosiasi politik jangka pendek, sementara implementasinya sering kali tidak disertai dengan komitmen kebijakan yang berkelanjutan. Bagi warga, situasi ini memperkuat persepsi bahwa boikot jalan memang dapat memaksa intervensi dan respons negara, tetapi tidak selalu menjamin keadilan dan perbaikan struktural yang mereka cari. Oleh karena itu, boikot jalan dapat dipahami sebagai strategi tekanan yang efektif dalam memicu respons awal negara, tetapi dengan kapasitas terbatas untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Ketegangan antara janji dan realisasi ini merupakan bagian penting dari dinamika hubungan negara-warga di tingkat lokal dan menjelaskan mengapa tindakan serupa sering terulang ketika tuntutan warga tidak sepenuhnya terpenuhi (Wijaya et al., 2023).

Respons pemerintah terhadap boikot jalan di Bima secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3. Pertama, respons represif ringan, yang ditandai dengan imbauan pembukaan jalan dan kehadiran aparat keamanan di lokasi aksi. Respons ini bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik, namun sering kali dipersepsikan warga sebagai bentuk tekanan. Kedua, respons dialogis berupa audiensi dan pertemuan antara perwakilan pemerintah dan warga. Tahap ini membuka ruang negosiasi dan komunikasi dua arah. Ketiga, respons kebijakan, yang diwujudkan melalui janji perbaikan jalan atau penanganan masalah, meskipun realisasinya tidak selalu penuh dan konsisten.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik boikot jalan menempatkan warga Bima dalam posisi paradoks dan tegang. Di satu sisi, tindakan ini mewakili bentuk artikulasi politik warga yang kuat, di mana masyarakat lokal tidak lagi menjadi penerima pasif kebijakan negara. Melalui boikot jalan, warga muncul sebagai aktor politik dengan kapasitas kolektif untuk memengaruhi arah kebijakan publik, menekan otoritas pemerintah, dan memaksa negara untuk menanggapi tuntutan yang telah diabaikan. Dalam konteks ini, boikot jalan berfungsi sebagai mekanisme untuk menegaskan kehadiran dan agensi politik warga. Lebih lanjut, tindakan kolektif ini menggeser posisi warga dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek politik yang aktif dan reflektif. Warga tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan mereka, tetapi juga secara sadar membangun solidaritas, merumuskan tuntutan kolektif, dan mengelola strategi aksi di ruang publik. Proses ini menunjukkan kemampuan warga untuk menafsirkan hubungan kekuasaan, memanfaatkan ruang politik yang tersedia, dan menggunakan tekanan sosial sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan negara. Dengan demikian, boikot jalan dapat dipahami sebagai praktik pembelajaran politik yang memperkuat kesadaran kolektif warga

tentang hak, posisi, dan kekuasaan mereka dalam struktur politik lokal. Namun, pengakuan warga negara sebagai aktor politik ini tidak datang tanpa konsekuensi. Penguatan peran warga negara melalui boikot jalan sebenarnya terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara, di mana negara mempertahankan otoritas hukum dan paksaan yang dominan. Oleh karena itu, posisi warga negara sebagai subjek politik diperebutkan dan terus-menerus berisiko dibatasi atau didiskreditkan. Meskipun demikian, temuan ini menegaskan bahwa boikot jalan di Bima bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan ekspresi kesadaran politik warga negara yang menuntut pengakuan, keadilan, dan partisipasi yang lebih setara dalam proses pengambilan keputusan publik.

Warga yang memilih memboikot jalan sebagai bentuk perjuangan kolektif bukannya tanpa risiko. Meskipun blokade jalan dianggap oleh warga sebagai upaya terakhir untuk menyuarakan aspirasi mereka dan menuntut keadilan, mereka menghadapi potensi kerentanan hukum. Negara memiliki instrumen dan peraturan hukum yang memungkinkan pengkategorian boikot jalan sebagai pelanggaran ketertiban umum, gangguan terhadap kepentingan umum, atau bahkan tindak pidana tertentu. Dalam konteks ini, warga yang terlibat dalam boikot menghadapi ancaman kriminalisasi, mulai dari pemanggilan oleh petugas penegak hukum, proses hukum formal, hingga stigmatisasi sebagai kelompok yang mengganggu. Risiko-risiko ini menyoroti dilema struktural yang melekat dalam praktik politik warga di ruang publik. Di satu sisi, sebagai warga negara, mereka memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan mengekspresikan aspirasi politik mereka, termasuk melalui protes.

Namun, di sisi lain, negara memiliki mandat untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum, yang sering digunakan sebagai dasar yang sah untuk membatasi atau mengatur tindakan kolektif warga. Ketegangan antara dua kepentingan ini, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban, tidak selalu diselesaikan secara adil dan dalam praktiknya sering kali menguntungkan negara. Lebih lanjut, dilema ini menunjukkan bagaimana hukum berfungsi secara ambivalen dalam hubungan negara-warga negara. Hukum dapat menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara, tetapi pada saat yang sama, hukum juga dapat digunakan sebagai alat kontrol dan disiplin terhadap tindakan kolektif yang dianggap mengganggu stabilitas. Dalam kasus boikot jalanan, ancaman kriminalisasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki efek pencegahan kolektif, berpotensi melemahkan keberlanjutan gerakan, mengikis solidaritas warga negara, dan membatasi ruang demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, boikot jalanan di Bima menunjukkan paradoks dalam praktik demokrasi: ketika warga negara menggunakan hak mereka untuk menuntut keadilan, mereka berisiko menghadapi sanksi hukum yang dilegitimasi atas nama ketertiban umum. Situasi ini menekankan bahwa perjuangan warga negara di ruang publik selalu terjadi dalam ketegangan antara ekspresi politik, kekuasaan negara, dan batasan hukum yang pada dasarnya netral.

Respons negara terhadap boikot jalan Bima mencerminkan dinamika hubungan kekuasaan yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum, stabilitas keamanan, dan kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi yang terganggu oleh blokade jalan. Tekanan ini mendorong pejabat negara untuk mengambil langkah-langkah pengendalian, mulai dari pemantauan intensif dan peringatan hingga tekanan administratif dan

simbolis terhadap warga negara. Namun, di sisi lain, negara juga berada di bawah tuntutan normatif dan politik untuk menanggapi aspirasi warga negara secara adil, terutama ketika boikot muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan struktural, kegagalan layanan publik, atau pengabaian suara lokal. Ketegangan antara fungsi koersif dan representatif negara ini menunjukkan ambivalensi dalam pelaksanaan kekuasaannya. Negara tidak hanya bertindak sebagai entitas represif, tetapi juga gagal untuk sepenuhnya memfasilitasi aspirasi warga negara. Respons yang muncul sering kali bersifat situasional dan pragmatis, dengan dialog yang dimulai bukan hanya karena pengakuan hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai strategi untuk meredakan konflik dan memulihkan kendali atas ruang publik. Di sisi lain, warga yang terlibat dalam boikot jalanan mendapati diri mereka berada dalam posisi yang sama pentingnya. Mereka harus terus-menerus menegosiasikan bentuk, durasi, dan intensitas perjuangan kolektif mereka agar tetap efektif dalam menekan negara untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pada saat yang sama, warga juga menyadari bahwa peningkatan tindakan mereka yang berlebihan berpotensi memicu respons represif, baik dalam bentuk kriminalisasi, intimidasi, atau pembubaran paksa, yang dapat melemahkan posisi tawar dan solidaritas internal mereka.

Oleh karena itu, praktik boikot jalanan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan spontan, tetapi lebih sebagai strategi politik yang diperhitungkan secara sosial, di mana warga berupaya menyeimbangkan visibilitas perlawanan mereka dengan mengelola risiko represi negara. Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa boikot jalanan di Bima mewakili arena negosiasi kekuasaan yang terus berubah, di mana negara dan warga saling menguji batas-batas legitimasi, kontrol, dan keadilan. Hubungan ini tidak statis, tetapi dibentuk melalui interaksi, kompromi, dan ketegangan yang terjadi sepanjang proses aksi dan respons yang menyertainya.

### **Respons Aparat Bima terhadap Aksi Boikot Jalan**

Respons pemerintah terhadap boikot jalan di Bima bersifat ambivalen, berfluktuasi antara dua posisi yang bertentangan. Di satu sisi, pejabat pemerintah dan pasukan keamanan cenderung memandang boikot jalan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat kegiatan masyarakat. Penutupan jalan dipandang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu distribusi barang, dan berisiko memicu konflik antar warga. Oleh karena itu, respons awal pemerintah umumnya berfokus pada pengendalian situasi.

Pada tahap awal protes, pihak berwenang sering hadir di lokasi untuk memantau kondisi, mengeluarkan peringatan, dan menekan warga untuk membuka kembali jalan. Kehadiran pasukan keamanan, seperti polisi dan pejabat pemerintah daerah, sering diartikan oleh warga sebagai peringatan bahwa protes mereka berada dalam batas kendali negara. Meskipun jarang disertai kekerasan terbuka, tekanan psikologis dari peringatan berulang dan negosiasi sepihak sangat signifikan bagi warga yang melakukan boikot.

Boikot jalan berfungsi sebagai mekanisme tekanan sosial yang memaksa negara untuk campur tangan dan mendengarkan. Pemerintah daerah, melalui perwakilan mereka, seringkali memberikan janji-janji perbaikan, baik yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, peningkatan keamanan, atau penanganan kasus kriminal yang memicu protes. Namun, penelitian menunjukkan bahwa realisasi janji-janji ini sering

kali parsial dan bertahap. Beberapa jalan diperbaiki, tetapi tidak sepenuhnya; atau proses perbaikannya lambat dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga.

Respons pemerintah terhadap boikot jalan di Bima secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Pertama, respons represif ringan yang ditandai dengan seruan untuk membuka jalan dan kehadiran pasukan keamanan di lokasi protes. Respons ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik, tetapi sering kali dianggap oleh warga sebagai bentuk tekanan. Kedua, respons dialogis, yang terdiri dari audiensi dan pertemuan antara perwakilan pemerintah dan warga, menciptakan ruang untuk negosiasi dan komunikasi dua arah. Ketiga, respons kebijakan, yang diwujudkan melalui janji perbaikan jalan atau penyelesaian masalah, meskipun implementasinya tidak selalu lengkap atau konsisten.

Aksi boikot jalan tersebut menempatkan warga Bima dalam dilema. Di satu sisi, aksi tersebut mengakui warga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan dan memaksa negara untuk menanggapi tuntutan mereka. Warga tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang mampu secara kolektif menyuarakan kepentingan mereka. Posisi ini juga membawa risiko. Boikot jalanan berpotensi membuat warga negara menghadapi tindakan hukum dan ancaman kriminalisasi, terutama ketika tindakan tersebut dianggap melanggar ketertiban umum atau hukum yang berlaku. Dilema ini mencerminkan ketegangan antara hak warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan kewajiban negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.

Respons negara terhadap boikot jalan Bima menunjukkan dinamika kompleks hubungan kekuasaan. Negara terpecah antara kebutuhan untuk mengendalikan situasi dan tuntutan untuk menanggapi aspirasi warga secara adil. Sementara itu, warga harus terus-menerus menegosiasikan bentuk perjuangan mereka agar tetap efektif dalam menuntut keadilan, tanpa mempertaruhkan represi yang dapat melemahkan posisi mereka sendiri.

## **Kesimpulan**

Studi ini menyimpulkan bahwa boikot jalan di Bima merupakan bentuk gerakan sosial warga yang lahir dari akumulasi ketidakadilan struktural, khususnya terkait dengan infrastruktur jalan yang buruk, jaminan keamanan yang lemah, dan ketidakefisien saluran partisipasi formal dalam menyampaikan aspirasi. Boikot jalan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan spontan atau gangguan ketertiban umum, melainkan sebagai strategi kolektif warga untuk menarik perhatian negara dan memulihkan posisi tawar mereka dalam hubungan kekuasaan yang tidak setara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jalan sebagai infrastruktur publik telah dipolitisasi, mengubah fungsinya dari sekadar alat mobilitas menjadi arena ekspresi politik dan negosiasi kekuasaan antara warga dan negara.

Respons negara yang ambivalen antara represi ringan dan pendekatan dialogis menegaskan bahwa boikot jalan menempatkan warga dalam dilema: di satu sisi, mereka diakui sebagai aktor politik, tetapi di sisi lain, mereka tetap berisiko dikriminalisasi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengayaan studi sosiologi politik dan gerakan sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks daerah terpinggirkan seperti Bima. Penelitian ini menunjukkan bahwa boikot jalan merupakan bagian dari repertoar aksi kolektif lokal yang rasional dan kontekstual, bukan sekadar bentuk perilaku anarkis seperti yang sering digambarkan dalam

wacana resmi negara. Dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori gerakan sosial kontemporer, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana konflik infrastruktur, kejahatan, dan ketidaksetaraan pembangunan merupakan pemicu utama aksi kolektif warga. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa praktik politik warga tidak selalu hadir dalam bentuk kelembagaan, tetapi juga melalui kontrol strategis ruang publik sebagai sarana untuk mengartikulasikan ketidakadilan sosial.

Penelitian merekomendasikan agar pemerintah daerah dan pusat menanggapi boikot jalan tidak hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga dengan memperkuat mekanisme dialog partisipatif yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pemerintah perlu memandang boikot jalan sebagai indikator kegagalan tata kelola pelayanan publik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan jaminan keamanan, bukan hanya sebagai masalah ketertiban umum. Lebih lanjut, perbaikan dalam perencanaan anggaran, transparansi kebijakan, dan distribusi pembangunan yang lebih merata diperlukan untuk mengatasi akar struktural konflik tersebut. Bagi generasi mendatang dan para peneliti, direkomendasikan untuk melakukan penelitian komparatif tentang boikot jalan di berbagai daerah atau menghubungkannya dengan dinamika politik, hukum, dan budaya lokal untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara negara, warga negara, dan ruang publik dalam konteks demokrasi di Indonesia.

## Referensi

- Crawford, M. (1995). Contesting the public realm: Struggles over public space in Los Angeles. *Journal of Architectural Education*, 49(1), 4-9. <https://doi.org/10.1080/10464883.1995.10734658>.
- Della Porta, D. (2015). *Social movements in times of austerity: Bringing capitalism back into protest analysis*. John Wiley & Sons.
- Fahmi, F., & Herman, H. (2021). Sastra dan politik lokal: Representasi politik lokal Bima sebuah kajian sosiologi sastra. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 452-460. <https://doi.org/10.36312/JISIP.V5I1.1711>.
- Fauziah, N. (2025). Disensus: Politik Para Penulis dalam Antalogi Puisi Bima Membara. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 15(1), 14-20. <https://doi.org/10.37630/jpb.v15i1.3031>.
- Firdaus, F. (2022). Pola Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Menangani Konflik Terkait Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 9(1), 117-130. <https://doi.org/10.59050/jkk.v9i1.99>.
- Harvey, P., & Knox, H. (2022). *Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise*. Cornell University Press.
- Massauna, M. W., Hamra, S., & Panggoa, E. (2025). Kesenjangan Sosial di Perkotaan: Kemiskinan dan Ketimpangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7869-7874. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11181>.

- Michael Noonan, R. (2016). Social movements in times of austerity: bringing capitalism back into protest analysis. *New Political Science*, 38(3), 452–454. <https://doi.org/10.1080/07393148.2016.1189191>.
- Mitchell, D. (1996). Political violence, order, and the legal construction of public space: power and the public forum doctrine. *Urban Geography*, 17(2), 152-178. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.17.2.152>.
- Rafiin. (2024). *Penjelasan Antropolog soal “Budaya” Blokir Jalan di Bima dan Dompu*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7296080/penjelasan-antropolog-soal-budaya-blokir-jalan-di-bima-dan-dompu>. Diakses tanggal 12 Januari 2026.
- Setiawan, B., & Rudiarto, I. (2016). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang Kota Bima. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 12(02), 154–168. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>.
- Subari, S., & Anwar, A. (2021). Hegemoni Elit-Elit Lokal Donggo dalam Membangun Gerakan Sosial di Bima Tahun 1972. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(2), 91-100. <https://doi.org/10.30872/yupa.v5i2.538>.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12-24. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>.
- Syafruddin, S., & Wadi, H. (2023). Konflik Komunal Antarwarga Desa Renda dan Desa Ngali (Studi di Kec. Belo Kab. Bima). *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo*, 1(2), 22-28. <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v1i2.5135>.
- Tarrow, S. (2021). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Wood, L. (2019). Social movements as politics. In *Social Movements, 1768-2018* (pp. 3-17). Routledge.
- Wardana, A. (2022). Infrastruktur, konflik, dan politik pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 123–139.
- Wijaya, A. B., Anisa, R., Loy, M. H., & Ranti, M. M. (2023). Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.404>.